

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dari Bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Yang dimaksud dengan Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Belanja Langsung yaitu Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Bappeda belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Realisasi Belanja Langsung bervariasi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 1. Realisasi pada tahun 2013 sebesar 94,76%.
 2. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 94,42%.
 3. Realisasi pada tahun 2015 sebesar 94,54%.
 4. Realisasi pada tahun 2016 sebesar 85,49%.
3. Penyusunan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Belanja Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Prosedur penyusunan belanja daerah dalam APBD berpedoman pada Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Berikut gambaran prosedur perencanaan anggaran daerah :

1. Pada awal bulan Juni dilakukan penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun berikutnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah dilakukan penyusunan rancangan KUA dan PPAS, pada minggu keempat bulan Juni KUA dan PPAS disampaikan oleh TAPD kepada KDH (Kepala Daerah). Pada awal bulan Juli KDH menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD, sampai ditetapkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
2. Proses Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan November. Adapun proses yang dilakukan dalam penetapan peraturan daerah tentang APBD Provinsi antara lain :
 - a. Awal minggu pertama pada bulan Agustus diberikan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD
 - b. Setelah menerima SE, Kasubag Program membuat nota dinas tentang pelaksanaan untuk membuat PRA-RKA ke semua bidang yang berada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. PRA-RKA tersebut memuat tentang kegiatan yang dilakukan oleh masing-

masing bidang pada tahun berikutnya serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing bidang.

- c. Setelah masing-masing bidang membuat PRA-RKA yang sesuai dengan Renja OPD. PRA-RKA tersebut dilaporkan kepada Bidang Program dan dientry oleh bidang Program melalui website sakato-plan.
- d. Setelah Bidang Program entry PRA-RKA, PRA-RKA tersebut akan diverifikasi oleh Bidang Perencanaan Bappeda yaitu pada Bidang Sosbud.
- e. Setelah PRA-RKA tersebut diverifikasi oleh Bidang Sosbud, TAPD menetapkan pagu indikatif yang dilakukan oleh Bidang Makro. Disaat penetapan pagu indikatif tersebut, PRA-RKA bisa bertambah bahkan bisa berkurang hal itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang pada tahun berikutnya.
- f. Setelah Bidang Makro menetapkan pagu indikatif PRA-RKA untuk tahun berikutnya dan berubah menjadi RKA. RKA tersebut akan dibahas dengan DPRD dan ditetapkan dengan cara masing-masing OPD.
- g. Setelah RKA disahkan oleh DPRD, maka RKA tersebut akan dientry lagi melalui website sakato-plan dan seterusnya akan dikompilasi oleh SIPKD.